

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

existence of an independent, democratic and inclusive civil society at the local level. These findings confirm that student organizations such as HMI have great potential as agents of social change capable of building a more just and competitive society. This organization's active role in educating and empowering the community helps strengthen the process of social and democratic development in the area. Thus, HMI Unbara Fisip Commissariat plays an important role as an agent of change who is able to strengthen the social space of civil society as a power base in developing a just and sustainable society.

Keywords: *Actualization of Movement Values, Social Space, Civil Society*

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks perkembangan sosial dan politik di Indonesia, civil society memegang peranan penting sebagai ruang masyarakat yang independen dan bebas dari intervensi negara maupun kekuasaan ekonomi. Civil society menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, memperjuangkan hak-hak, serta memperkuat demokrasi dan keadilan sosial. Di Kabupaten OKU, tantangan yang dihadapi dalam penguatan civil society meliputi minimnya partisipasi masyarakat, rendahnya kesadaran politik, serta terbatasnya ruang yang memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.

Di sisi lain, kampus dan organisasi mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agent of social change. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sebagai organisasi kader tertua di Indonesia, memiliki landasan nilai dan tradisi intelektual yang kuat melalui Nilai Dasar Perjuangan (NDP). HMI bukan hanya wadah pembentukan karakter dan kapasitas individu, tetapi juga instrumen sosial yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap masyarakat. HMI Komisariat FISIP UNBARA, dengan basis keilmuan ilmu sosial dan politik, memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi sosial dan memperkuat ruang publik lokal.

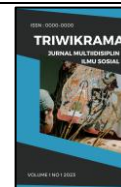
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya termaksimalkan. Aktivitas mahasiswa sering kali hanya terfokus pada kegiatan internal organisasi, sementara peran strategis sebagai penggerak literasi publik, advokasi kebijakan lokal, dan pendampingan masyarakat belum sepenuhnya diaktualisasikan. Padahal, masyarakat OKU membutuhkan ruang dialog, edukasi publik, serta aktor-aktor independen yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat secara objektif.

Oleh karena itu, aktualisasi nilai-nilai pergerakan HMI seperti independensi, intelektualitas, keislaman, dan pengabdian menjadi sangat relevan untuk memperkuat posisi HMI sebagai katalis penguatan civil society. Melalui penguatan kapasitas kader, gerakan intelektual yang berkelanjutan, advokasi isu lokal, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, HMI dapat menjadi motor penggerak ruang sosial yang lebih kritis, inklusif, dan berdaya di Kabupaten OKU.

Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki landasan ideologis dan nilai-nilai perjuangan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fisip Universitas Baturaja (Unbara) memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam memperkuat ruang sosial civil society di OKU. Nilai-nilai pergerakan HMI, seperti keimanan, keilmuan, keindonesiaan, dan keadilan sosial, dapat menjadi dasar dalam membangun kesadaran kolektif dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, dalam prakteknya, pergerakan mahasiswa dan organisasi seperti HMI perlu terus diaktualisasikan dan disesuaikan dengan dinamika sosial di lapangan agar mampu menjadi katalis yang efektif dalam memperkuat civil society. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang konkret untuk menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari upaya membangun ruang sosial yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan di Kabupaten OKU.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan aktualisasi nilai pergerakan HMI Komisariat Fisip Unbara sebagai bentuk kontribusi nyata dalam penguatan ruang sosial civil society di OKU, demi terciptanya masyarakat yang mandiri, berdaya, dan mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah dan nasional.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses aktualisasi nilai pergerakan HMI serta perannya dalam penguatan ruang sosial civil society di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap fakta, dinamika, dan makna sosial yang berkembang di lapangan secara komprehensif. Penelitian dilakukan di HMI Komisariat FISIP UNBARA, sebagai objek kajian organisasi dan beberapa titik aktivitas sosial di Kabupaten OKU yang memiliki relevansi dengan keberadaan civil society (misalnya ruang diskusi publik, instansi pemerintah, komunitas pemuda, dan masyarakat umum). Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dengan aktivitas HMI maupun dinamika civil society di OKU.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama Wawancara Mendalam Digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan penilaian informan mengenai Aktualisasi nilai pergerakan HMI, Kegiatan HMI dalam bidang kajian, advokasi, dan pengabdian dan Dampak HMI terhadap penguatan ruang sosial civil society di OKU. Observasi Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas kegiatan kaderisasi dan kajian intelektual, diskusi publik atau seminar, program pengabdian masyarakat, dan interaksi HMI dengan komunitas dan masyarakat OKU serta Studi Dokumentasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konteks Pergerakan HMI dan Tantangan Civil Society di OKU

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi kaderisasi memiliki peran historis dalam memperkuat nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, serta pembangunan sosial. Dalam konteks Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dinamika ruang sosial masyarakat sipil (civil society) menghadapi sejumlah tantangan seperti rendahnya partisipasi publik, keterbatasan literasi politik, minimnya ruang diskusi kritis, serta kecenderungan dominasi aktor politik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kondisi ini menempatkan organisasi mahasiswa sebagai salah satu entitas yang potensial dalam memperluas ruang sosial yang lebih egaliter dan demokratis.

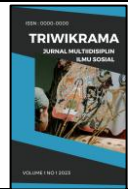
HMI Komisariat FISIP Unbara dengan basis keilmuan sosial-politik mempunyai peluang strategis untuk melakukan intervensi berupa pendidikan kritis, advokasi sosial, dan pembentukan kultur partisipatif. Proses aktualisasi nilai gerakan HMI menjadi penting untuk membaca sejauh mana kontribusi organisasi terhadap revitalisasi ruang publik di OKU.

b. Implementasi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI dalam Penguatan Civil Society

Nilai Dasar Perjuangan HMI yang mencakup nilai keimanan, kemanusiaan, keilmuan, dan keadilan menjadi fondasi gerakan kader dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Dalam praktiknya, aktualisasi nilai tersebut diwujudkan melalui beberapa aktivitas:

1. Penguatan Kritis-Mindset Mahasiswa

Kegiatan diskusi publik, latihan kepemimpinan, serta ruang kajian tematik yang rutin diselenggarakan komisariat mendorong tumbuhnya daya kritis mahasiswa terhadap permasalahan lokal, seperti tata kelola pemerintahan daerah, isu kemiskinan, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta problem lingkungan hidup. Aktivitas ini



secara tidak langsung memperluas ruang diskursus publik di lingkungan kampus dan masyarakat OKU.

2. **Pembentukan Etika Publik melalui Gerakan Intelektual**

Aktualisasi nilai integritas, keadilan, dan profesionalisme melalui kegiatan ilmiah, pelatihan administratif, dan pendidikan politik mendorong hadirnya kultur etika publik di kalangan mahasiswa. Dalam jangka panjang, hal ini menjadi modal sosial dalam menciptakan aktor-aktor muda yang mampu memperbaiki kualitas demokrasi lokal.

c. HMI sebagai Katalis Ruang Sosial Civil Society di OKU

Posisi HMI sebagai katalis tercermin dari kemampuannya menghubungkan berbagai elemen masyarakat melalui:

1. **Produksi Ruang Dialog yang Inklusif**

Komisariat FISIP Unbara menjadi wadah yang mempertemukan mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, serta aktor pemerintah daerah dalam sebuah dialog terbuka. Aktivitas FGD, seminar publik, hingga forum lintas organisasi turut memfasilitasi terbentuknya ruang publik deliberatif ala Habermas—dimana diskusi rasional dapat mempengaruhi arah kebijakan lokal.

2. **Mobilisasi Partisipasi Generasi Muda**

Dengan penetrasi kuat di kampus dan jejaring organisasi daerah, HMI berperan sebagai agen mobilisasi kesadaran politik generasi muda. Partisipasi ini terlihat melalui keterlibatan dalam isu sosial seperti pemantauan pemilu, perumusan kritik kebijakan publik, dan gerakan solidaritas bencana.

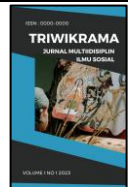
Pergerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam memperkuat ruang sosial civil society di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Salah satu organisasi mahasiswa yang aktif dan memiliki pengaruh signifikan adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), khususnya Komisariat Fisip Unbara. Aktivitas dan nilai-nilai yang diusung HMI dapat menjadi katalis dalam memperkuat keberadaan civil society yang mandiri, demokratis, dan berdaya.

Aktualisasi nilai-nilai pergerakan dalam HMI Komisariat Fisip Unbara, seperti keikhlasan, keberanian, dan solidaritas, mampu membangun kesadaran politik dan sosial di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Nilai-nilai ini mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berperan sebagai agen perubahan internal kampus, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam pembangunan sosial di tingkat lokal, termasuk di OKU.

Sebagai katalis, peran HMI dalam memperkuat civil society terlihat dari bagaimana organisasi ini mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, mengadvokasi hak-hak rakyat, serta memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah dan lembaga lain. Melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis nilai-nilai keislaman dan nasionalisme, HMI dapat membangun ruang-ruang dialog dan kolaborasi yang sehat, yang menjadi pondasi civil society yang kuat.

Selain itu, keberadaan HMI Komisariat Fisip Unbara di OKU dapat memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya civil society sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara kolektif. Dengan demikian, pergerakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberi dampak nyata dalam membangun masyarakat yang lebih adil, makmur, dan demokratis.

Secara umum, aktualisasi nilai pergerakan HMI Komisariat Fisip Unbara dapat dilihat sebagai upaya strategis dalam mengembangkan civil society di OKU. Melalui kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, penyadaran politik, dan penguatan solidaritas



sosial, organisasi ini mampu menjadi agen perubahan yang efektif dalam membangun ruang sosial yang lebih inklusif dan demokratis.

HMI Komisariat Fisip Universitas Baturaja (Unbara) di Kabupaten OKU dipersepsikan sebagai organisasi yang berupaya menjaga keberpihakan terhadap masyarakat melalui peran sebagai bagian dari civil society yang kritis dan independen. Dalam konteks dinamika politik lokal, HMI berkomitmen untuk tetap menjaga jarak dari kekuasaan dan kepentingan elit politik. Hal ini dilakukan agar organisasi tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara objektif dan tidak terjebak dalam pengaruh kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Strategi ini menunjukkan bahwa HMI berusaha menempatkan diri sebagai penguat ruang sosial yang independen, berfungsi sebagai pengontrol kebijakan publik, dan penyeimbang dalam proses politik di tingkat lokal. Dengan menjaga jarak dari kekuasaan, HMI mampu tetap kritis terhadap kebijakan yang diambil dan memastikan bahwa proses pembangunan dan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Pendekatan ini menjadi landasan utama dalam membangun citra organisasi yang netral, independen, dan berintegritas dalam ekosistem masyarakat sipil.

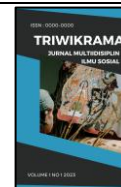
Secara keseluruhan, keberpihakan HMI dalam konteks ini lebih menekankan pada peran sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan, bukan sebagai bagian dari kekuasaan itu sendiri. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi untuk tetap berada di jalur civil society yang kritis dan independen demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat. Dapat dilihat dari hasil wawancara bersama saudara M Nasir Nandi Putra:

“HMI Komisariat fisip berusaha menjaga peran sebagai bagian dari civil society yang kritis dan independen dalam menghadapi dinamika politik lokal di Kabupaten OKU. HMI menolak keterlibatan pada kepentingan elite atau kelompok politik tertentu, sehingga tetap mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif. Dengan menjaga jarak dari kekuasaan, HMI berfungsi sebagai penguat ruang sosial, pengontrol kebijakan publik, serta penyeimbang agar politik lokal berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.”

Pandangan ketua HMI Komisariat Fisip sebagai bagian dari masyarakat sipil tentang permasalahan di Kabupaten OKU menunjukkan bahwa keberadaan civil society sangat penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD dan pejabat daerah menjadi indikator bahwa institusi formal tidak selalu mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, sehingga peran masyarakat sipil menjadi sangat krusial sebagai pengawas independen.

Kasus ini tidak hanya mencederaikan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan wakil rakyat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat sipil yang kritis dan aktif dalam mengawal jalannya proses hukum maupun kebijakan menjadi sangat penting. Mereka harus mampu menjaga momentum agar penyimpangan tidak dibiarkan terjadi dan agar akuntabilitas pejabat publik tetap terjaga.

Selain itu, pandangan ini menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi civil society di daerah harus diatasi dengan memperkuat peran serta masyarakat dalam memantau dan mengawal jalannya pemerintahan. Melalui kegiatan pengawasan dan partisipasi aktif, civil society dapat membantu memastikan bahwa aktor politik bertanggung jawab dan bahwa proses demokrasi berjalan secara transparan dan adil. Dengan demikian, keberadaan civil society tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai kekuatan yang mendorong



reformasi dan peningkatan kualitas pemerintahan di Kabupaten OKU. Dapat dilihat dari hasil wawancara bersama saudara M Nasir Nandi Putra:

“bahwa kondisi civil society di Kabupaten OKU sedang menghadapi tantangan serius akibat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa anggota DPRD dan pejabat daerah. Menurutnya, kasus ini mencederai kepercayaan publik karena para wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat justru terlibat dalam tindakan yang merugikan. Dari sudut pandangnya, peristiwa ini menunjukkan semakin pentingnya keberadaan masyarakat sipil sebagai pengawas independen, karena institusi formal tidak selalu mampu menjaga integritasnya. Ia juga menilai kasus tersebut sensitif dan memiliki dampak besar, karena melibatkan pejabat publik serta dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah dan tingkat kepercayaan masyarakat. Secara keseluruhan, sudut pandang narasumber menegaskan bahwa civil society harus tetap kuat, kritis, dan aktif mengawal proses hukum maupun kebijakan, terutama ketika terjadi penyimpangan oleh aktor-aktor politik lokal.”

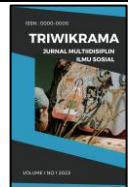
Tantangan dan hambatan utama yang dihadapi HMI dalam menyadarkan masyarakat tentang politik di Kabupaten OKU berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat setempat. Banyak warga yang tidak memiliki latar belakang pendidikan politik yang cukup, sehingga mereka cenderung apatis atau enggan untuk terlibat dalam diskusi maupun aktivitas politik. Kondisi ini menyulitkan proses edukasi politik karena masyarakat kurang memahami pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Selain itu, hambatan lain muncul dari ketakutan masyarakat saat diajak berdiskusi mengenai persoalan politik. Rasa takut akan konsekuensi atau ancaman dari pihak tertentu membuat mereka enggan terbuka dan aktif dalam menyuarakan pendapat. Di samping itu, terbatasnya ruang dan kesempatan yang diberikan kepada HMI untuk melakukan kegiatan penyadaran secara langsung juga menjadi faktor penghambat. Kurangnya akses ke komunitas dan media komunikasi yang efektif menyebabkan kegiatan edukasi politik tidak berjalan optimal.

Persepsi masyarakat yang sempit terhadap organisasi kemahasiswaan, yang dianggap hanya bergerak di ruang kampus dan tidak peduli dengan isu-isu masyarakat luas, juga menjadi hambatan besar. Hal ini membuat HMI harus berupaya keras membangun citra dan kepercayaan sebagai organisasi yang mampu menjadi agen perubahan, sekaligus menjaga nilai keislaman dan keindonesiaan sebagai dasar perjuangan mereka.

Secara keseluruhan, tantangan terbesar yang dihadapi HMI adalah bagaimana membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam politik, sekaligus mengatasi persepsi negatif dan ketakutan yang ada. Dengan strategi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam proses politik, serta mampu berpartisipasi aktif demi kemajuan daerah dan bangsa. Dapat dilihat dari hasil wawancara bersama saudara M Nasir Nandi Putra:

“menegaskan bahwa tantangan dan hambatan utama HMI dalam menyadarkan masyarakat sipil terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten OKU adalah rendahnya kesadaran politik masyarakat. Banyak warga tidak memiliki latar belakang politik dan cenderung enggan terlibat atau membahas isu-isu politik, sehingga proses edukasi politik menjadi sulit. Hambatan lainnya adalah ketakutan masyarakat ketika diajak berdiskusi tentang persoalan politik, serta terbatasnya ruang atau kesempatan HMI untuk melakukan penyadaran secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, HMI juga harus menghadapi persepsi masyarakat yang sempit terhadap organisasi kemahasiswaan, seakan hanya bergerak di ruang internal kampus. Secara keseluruhan,



tantangan terbesar HMI adalah bagaimana membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam dinamika politik, sekaligus menjaga nilai keislaman dan keindonesiaan sebagai dasar perjuangan organisasi.”

Keterkaitan HMI Komisariat Bisip Unwara dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sipil kepada pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat signifikan. Sebagai organisasi kemahasiswaan yang aktif, HMI berperan sebagai mediator dan penyalur aspirasi masyarakat, khususnya dalam menyoroti berbagai dinamika dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di tingkat lokal.

Aspirasi yang disampaikan biasanya berkaitan dengan isu-isu penting seperti kenaikan tarif PDAM, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aspek lain yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. HMI melakukan komunikasi dan penyampaian aspirasi ini melalui berbagai jalur resmi, baik ke pihak eksekutif maupun legislatif, termasuk mengikuti forum-forum diskusi, rapat dengar pendapat, maupun pertemuan-pertemuan resmi yang melibatkan pejabat terkait. Dengan demikian, HMI tidak hanya berperan sebagai organisasi mahasiswa, tetapi juga sebagai bagian dari civil society yang aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat.

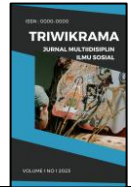
Upaya ini menunjukkan komitmen HMI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Melalui peran tersebut, diharapkan suara masyarakat dapat terdengar dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, hubungan antara HMI dan pemerintah daerah di Kabupaten OKU menjadi semakin erat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sipil. Dapat dilihat dari hasil wawancara bersama saudara M Nasir Nandi Putra:

“bahwa HMI Komisariat Bisip Unwara aktif berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat sipil kepada pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Aspirasi yang disampaikan biasanya berhubungan dengan dinamika kebijakan daerah, seperti kenaikan tarif PDAM dan persoalan-persoalan pelayanan publik lainnya. HMI menyampaikan aspirasi melalui jalur eksekutif maupun legislatif, termasuk forum-forum resmi yang menghadirkan pejabat terkait. Upaya ini menunjukkan komitmen HMI dalam mengawal kepentingan publik dan memastikan suara masyarakat didengar oleh pemangku kebijakan.”

Saran dan harapan dari Ketua Komisariat FISIP agar masyarakat sipil, termasuk HMI dan kelompok lainnya, dapat turut serta kebersamai dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik sangat penting. Ia berharap masyarakat sipil berperan aktif dan berani dalam mengkaji serta membahas berbagai persoalan sosial dan politik secara kritis. Dengan sikap kritis dan kepercayaan diri, masyarakat dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Lebih jauh, Ketua Komisariat FISIP menekankan bahwa keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang baik sangat bergantung pada masyarakat yang cerdas dan berani terlibat dalam proses pembangunan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas akan mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu memajukan daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, saran khusus disampaikan kepada generasi muda, terutama dari kalangan mahasiswa dan Generasi Z, agar tidak sekadar menempuh pendidikan formal. Mereka harus benar-benar memahami ilmu yang dipelajari, mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata, dan aktif berkontribusi dalam dinamika pembangunan daerah.



Dengan cara ini, diharapkan mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa kemajuan dan memastikan keberlanjutan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bersinergi dengan masyarakat. Dapat dilihat dari hasil wawancara bersama saudara M Nasir Nandi Putra:

“menyampaikan harapan agar masyarakat sipil, termasuk HMI dan kelompok lainnya, dapat bersama-sama mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik melalui keberanian mengkaji serta membahas persoalan sosial-politik secara kritis. Ia menekankan pentingnya masyarakat yang cerdas dan berani terlibat agar mampu menghasilkan SDM berkualitas dan daerah yang lebih layak. Selain itu, ia memberi saran khusus kepada generasi muda terutama Gen Z dan mahasiswa agar tidak hanya sekadar menempuh pendidikan formal, tetapi juga benar-benar memahami ilmu yang dipelajari dan aktif berkontribusi dalam dinamika pembangunan daerah”

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

HMI Komisariat FISIP UNBARA memegang peran penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat sipil kepada pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, khususnya dalam menyampaikan isu-isu seperti kenaikan tarif PDAM dan pelayanan publik. Melalui jalur resmi dan forum-forum diskusi, HMI berkomitmen mengawal kepentingan masyarakat dan memastikan suara rakyat didengar oleh pemangku kebijakan.

Selain itu, Ketua Komisariat FISIP mengungkapkan harapan agar masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan generasi muda, berperan aktif, kritis, dan berani dalam mengkaji serta membahas persoalan sosial-politik. Diharapkan, dengan masyarakat yang cerdas dan terlibat secara aktif, akan tercipta pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab. Generasi muda, khususnya mahasiswa dan Gen Z, diajak untuk tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga memahami dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari demi kemajuan daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah, diharapkan tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Saran

1. Perluasan dan Konsistensi Kegiatan

Untuk meningkatkan dampak dan keberlanjutan penguatan civil society, disarankan agar HMI Komisariat Fisip Unbara dapat memperluas jangkauan kegiatan dan melaksanakan program secara konsisten, sehingga mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat dan memperkuat jejaring kerja sama yang sudah terbentuk.

2. Penguatan Kapasitas dan Sumber Daya

Diperlukan peningkatan kapasitas anggota dan kader dalam bidang kepemimpinan, advokasi, dan pengelolaan program. Selain itu, mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan efektif.

3. Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat

Disarankan agar kegiatan lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara langsung, bukan hanya edukasi teori, sehingga tercipta perubahan nyata di lapangan dan masyarakat merasa memiliki dan aktif terlibat dalam proses pembangunan.



4. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Penting dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan pengaruhnya terhadap penguatan civil society serta untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

5. Membangun Kemitraan Lebih Luas

Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga lain, seperti LSM, pemerintah, dan institusi pendidikan, agar program yang dijalankan memiliki dukungan lebih besar dan mampu memberikan dampak yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azra, A. (2008). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Dunia*.

Edwards, M. (2019). *Civil society*. Jakarta: LP3ES.

Effendi Wahyono. (2014). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pergerakan Kebangsaan Dalam Pendidikan Karakter Bangsa*.

Nasution, A. B. (2021). *Membangun civil society di Indonesia: Beberapa catatan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Triwibowo, D. (2018). *Gerakan sosial wahana civil society bagi demokratisasi*. LP3ES

Jurnal

Hasyim, M. (2018). *Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Penguatan Civil Society di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Politik, 12(2), 45-60.

Ismail, A. (2020). *Pergerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Sosial, 8(3), 123-135.

Kurniawan, F. (2019). *Aktualisasi Nilai Pergerakan dalam Membangun Ruang Sosial Civil Society*. Jurnal Ilmu Sosial, 14(1), 89-105.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan: Mengatur tentang pendirian, fungsi, hak, kewajiban, serta pembubaran Ormas sebagai wadah masyarakat sipil.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang: Merupakan perubahan signifikan terhadap UU No. 17 Tahun 2013

LAMPIRAN

